

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Nomor SOP :/BLUPPB/OT.310/II/2023

Tgl Pembuatan : 20 Februari 2023
Tgl Efektif : 06 Maret 2023

Tgl Pengesahan : 06 Maret 2023

Disahkan oleh : Kepala BLUPPB KARAWANG

M. Tahang

NIP. 19800507 200312 1 002

Nama SOP : Pemutahiran dan Penetapan Daftar Informasi

Publik

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Mempunyai communication skill 3 Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Kemampuan pendokumentasian informasi Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Pendokumentasian Informasi Publik Komputer, laptop, ATK 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Jaringan internet Peringatan Pencatatan dan Pendataan Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
No.		PPID BI	LUPPB	Unit Pelayanan Publik	PPID Kementerian/ PPID Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Penyusunan DIP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan konsep surat permintaan pemutahiran DIP dari unit kerja eselon I						Komputer, ATK	60 menit	Permohonan informasi	Memo
2	Menyampaikan surat permintaan pemutakhiran DIP kepada unit Pelayanan Publik		<i>,</i>	→			Komputer, ATK	1 hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usulan ke PPID BLUPPB
3	Menerima usulan DIP dari PPID unit Pelayanan Publik						Usulan pemutahiran DIP		Usulan pemutahiran DIP	
4	Mengkatagorikan dan mengompilasi jenis informasi, dan menyiapkan konsep surat keputusan						Komputer, ATK, internet	2 hari	Konsep surat pemutahiran DIP	
5	Menyampaikan konsep surat pemutakhiran DIP kepada PPID Kementerian untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Kementerian						Konsep surat pemutahiran DIP	1 hari	Konsep surat pemutahiran DIP	
6	Penetapan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan						Konsep DIP	5 hari	DIP	